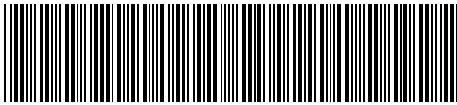




SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 032.07.2.499346/2025



DS:0075-5283-0105-6040

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 2. Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
 - 3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
 - 4. Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG
 - Sebesar : Rp. 17.679.108.000 (TUJUH BELAS MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	13.054.108.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	4.625.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 17.679.108.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

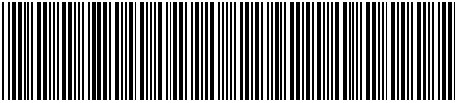
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025



DS:0075-5283-0105-6040

Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

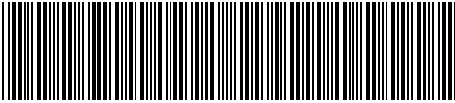
04	EKONOMI	Rp.	13.404.108.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp.	13.404.108.000
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	4.275.000.000
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rp.	4.275.000.000

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025

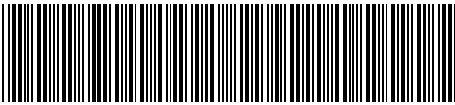


DS:0075-5283-0105-6040

Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	3.400.000.000
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Rp.	3.400.000.000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	1.225.000.000
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	350.000.000
HB.2366	Penataan Ruang Laut	Rp.	875.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	13.054.108.000
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Rp.	13.054.108.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
I A. INFORMASI KINERJA

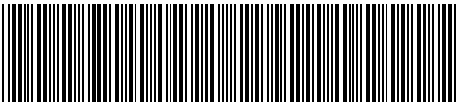


DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				3.400.000.000
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				3.400.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Luas Kawasan Konservasi Baru				
		2. 02	Luas Kawasan Konservasi yang Efektif Dikelola (kumulatif)				
		3. 03	Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi (%)				
		4. 04	Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan (25 jenis) (%)				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	155.000.000
Rincian Output	:	01	PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	155.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2362.PCA	Perizinan Produk	2,00	Produk, Keputusan	2.010.000.000
Rincian Output	:	01	PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan (PN)	2.00	Produk	2.010.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2362.PEE	Kemitraan	1,00	Kesepakatan	70.000.000
Rincian Output	:	01	PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem (PN)	1.00	Kesepakatan	70.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik	5,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	815.000.000
Rincian Output	:	01	QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan (PN)	5.00	dokumen	815.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies	1,00	Jenis	250.000.000
Rincian Output	:	01	REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif) (PN)	1.00	Jenis	250.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
I A. INFORMASI KINERJA

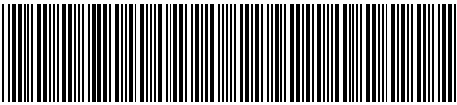


DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Klasifikasi Rincian Output	6	:	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	25,00	Orang, Kegiatan	100.000.000
Rincian Output		:	01	SCC.002 Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensi nya	(PN)	25.00 Orang	100.000.000
Program		:	032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.225.000.000
Kegiatan		:	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			350.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (kelompok)		
			2.	01	Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (pulau) (kumulatif)		
			3.	02	Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)		
			4.	02	Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya (Pulau) (kumulatif)		
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		1,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	350.000.000
Rincian Output		:	01	PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	1.00 Rekomendasi Kebijakan	350.000.000
Kegiatan		:	2366	Penataan Ruang Laut			875.000.000
		:	1.	01	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW)		
			2.	01	Persentase Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan		
			3.	02	Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)		
			4.	02	Persentase KKPR L yang dimonitoring dan evaluasi (%)		
			5.	03	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)		
			6.	04	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun		
			7.	05	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan		
			8.	06	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
I A. INFORMASI KINERJA

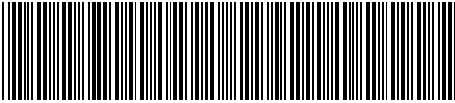


DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Klasifikasi Rincian Output	2	:	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi	875.000.000
Rincian Output	:	01	PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah (PN)	1.00	Teknis, Dokumen Rekomendasi Kebijakan	875.000.000
Program	:	032.07.WA	Program Dukungan Manajemen				13.054.108.000
Kegiatan	:	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				13.054.108.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai SAKIP DJPKRL (Nilai)				
		2. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)				
		3. 03	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPKRL (indeks)				
		4. 04	Nilai Kinerja Anggaran KKP (nilai)				
		5. 05	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan DJPKRL (nilai)				
		6. 06	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPKRL (persen)				
		7. 07	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)				
		8. 08	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)				
		9. 09	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)				
		10. 10	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Ditjen PKRL				
		11. 11	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	12.745.868.000
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN	6.00	Layanan	56.120.000
		02	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	18.020.000
		03	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	122.948.000
		04	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	29.780.000
		05	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	12.519.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0075-5283-0105-6040

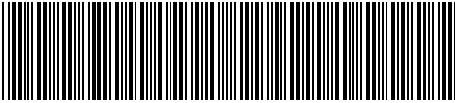
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Klasifikasi Rincian Output	2	:	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	5,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	82.660.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	5.00	Orang	82.660.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	225.580.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	93.270.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	72.170.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	60.140.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
I B. SUMBER DANA



DS:0075-5283-0105-6040

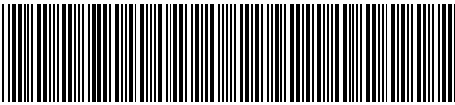
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	17.679.108.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	13.054.108.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	4.625.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	9.466.000	8.213.108	-	-	-	17.679.108	08 . 55	
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	3.400.000	-	-	-	3.400.000		
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	3.400.000	-	-	-	3.400.000		
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	155.000	-	-	-	155.000		
04	PNBP	-	155.000	-	-	-	155.000		
2362.PCA	Perizinan Produk (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	2.010.000	-	-	-	2.010.000		
04	PNBP	-	2.010.000	-	-	-	2.010.000		
2362.PEE	Kemitraan (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	70.000	-	-	-	70.000		
04	PNBP	-	70.000	-	-	-	70.000		
2362.QMA	Data dan Informasi Publik (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	815.000	-	-	-	815.000		

DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG
Kewenangan : (KD)

[illegible]

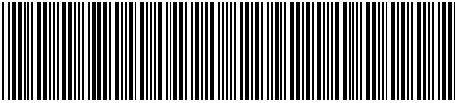
DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	225.580	-	-	-	225.580	010@	
JUMLAH		9.466.000	8.213.108	-	-	-	17.679.108		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DS:0075-5283-0105-6040

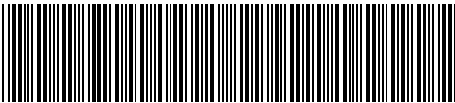
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
IV A. B L O K I R



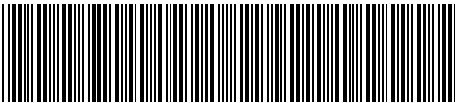
DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [499346] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
499346 032.07.FD 2362 2362.PBW 2362.PCA	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.700
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 4.720.760		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	52 Belanja Barang Rp. 4.720.760		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Program Kualitas Lingkungan Hidup		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.200
	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 147.860		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.140		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.032.080
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Perizinan Produk		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	2362.PEE	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.379		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 320.620
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 188.400		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 285.071
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)		Kemitraan
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.550		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.100
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
IV A. B L O K I R



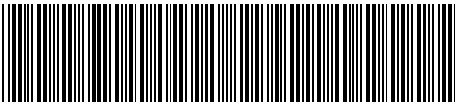
DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [499346] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2362.QMA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.400	2362.REB	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Rp. 12.200
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.200
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.580		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 533.825
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.400		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.970
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.520		Konservasi Jenis/Spesies
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.765
2362.QMA	Data dan Informasi Publik	2362.REB	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.905		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 148.000		522141 Belanja Sewa(PNBP)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.450
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
2362.QMA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.100	2362.REB	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Rp. 6.600
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.600
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		belum dilengkapi ijin penggunaan PNB
2362.QMA		2362.REB	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
IV A. B L O K I R

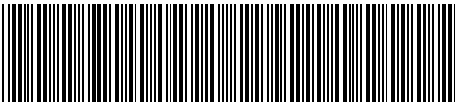


DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [499346] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2362.SCC	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 124.975 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	032.07.HB 2365 2365.PBW	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.040 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.610 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.600 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.420 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.720 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		522141 Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 302.680 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 74.670 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.900 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.970 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		2366 2366.PBT Penataan Ruang Laut Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.610 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
IV A. B L O K I R



DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [499346] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

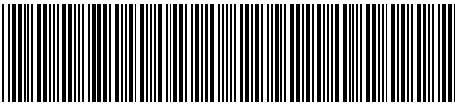
Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
032.07.WA 2367 2367.EBA 2367.EBC 2367.EBD	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000		
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 759.290		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.100		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Program Dukungan Manajemen		
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.404		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Layanan Manajemen SDM Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.074		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.282		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.499346/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0075-5283-0105-6040

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [499346] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175